

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi suatu negara berjalan secara berkelanjutan dan bergantung pada proses pembangunan ekonomi (Saefulloh et al., 2023). Upaya sistematis suatu negara untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja baru yang dikenal sebagai pembangunan ekonomi (Amsari et al., 2024). Dalam konteks global, pembangunan ekonomi memegang peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing negara di kancah internasional.

Negara-negara berkembang mendapat manfaat dari globalisasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Karena hambatan perdagangan di masa lalu, negara-negara berkembang gagal memanfaatkan ekonomi global sepenuhnya, dan tertinggal dari pertumbuhan ekonomi negara maju. Namun, sebagai akibat dari globalisasi Bank Dunia dan organisasi internasional mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan perbaikan pasar dan transformasi fundamental. Oleh karena itu, banyak negara berkembang mulai membuka pasar mereka dengan menghapus tarif dan meliberalisasi ekonomi. Dengan demikian, negara-negara berkembang yang pada akhirnya memungkinkan orang-orang kurang mampu mendapatkan pekerjaan.

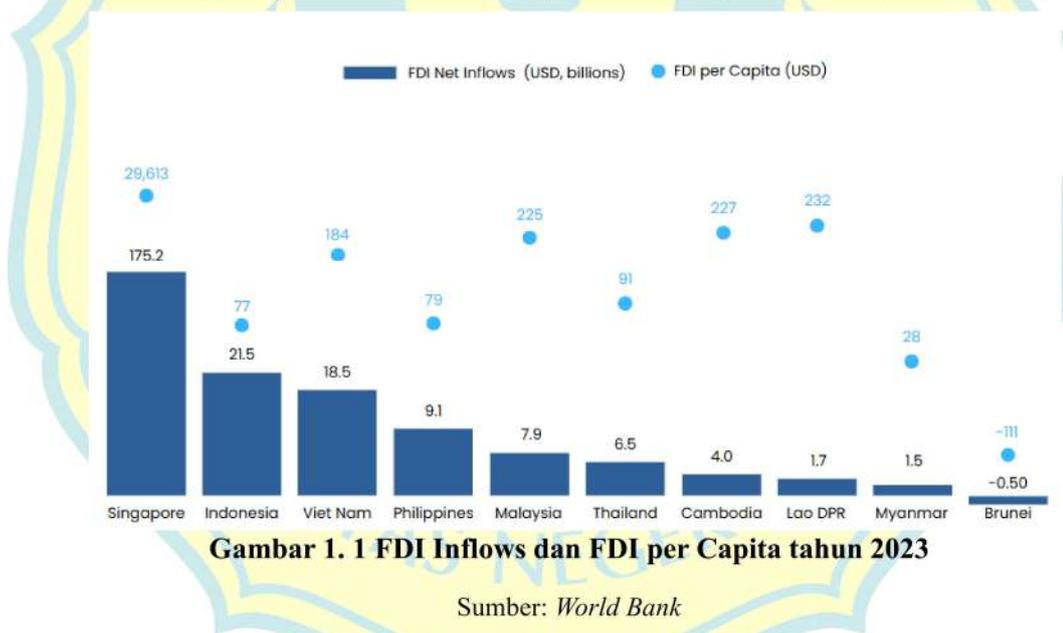
Negara-negara berkembang sangat menyadari pentingnya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi (Dassucik & Farida, 2025). Namun, proses pembangunan ini membutuhkan modal yang besar. Akibatnya, keterbatasan modal domestik sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, investasi memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara melalui peningkatan kapasitas produksi dari pembentukan modal baru dan perluasan kesempatan kerja (Indrani & Rachman, 2024). Ketika modal baru—baik dari investor domestik maupun asing—ditanamkan dalam perekonomian, sektor-sektor produktif dapat berkembang lebih cepat dan efisien (Andriani & Suyatno, 2024). Dengan modal yang lebih besar, perusahaan dapat memperluas operasional, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja baru. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini akan mendorong pertumbuhan pendapatan nasional dan memperkuat basis ekonomi negara. Tingginya tingkat investasi menjadi indikator utama potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena ketersediaan modal yang besar memungkinkan pelaksanaan proyek pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur dan pengembangan teknologi (Saputra et al., 2023).

Investasi asing langsung merupakan komponen strategis dalam pembangunan ekonomi negara berkembang (Utouh & Kitole, 2024). Selain membawa modal, investasi ini menawarkan berbagai manfaat jangka panjang (Nyiwul & Koirala, 2022). Teknologi produksi modern dapat masuk ke industri lokal, disertai transfer keahlian manajerial dan praktik bisnis internasional yang meningkatkan daya saing perusahaan lokal di pasar global (Teece, 2025). Selain itu, investasi asing langsung mengurangi pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat (Mkombe et al., 2021). Dalam jangka panjang, dampaknya terlihat pada peningkatan nilai tambah produksi dan pertumbuhan pendapatan nasional (Gaspareniene et al., 2022)

Besarnya proyek pembangunan jangka panjang yang direncanakan oleh negara-negara ASEAN, menjadikan negara-negara tersebut berlomba-lomba untuk menarik minat investor asing guna menanamkan modal mereka (Jiang, 2019). Negara-negara ASEAN semakin menjadi sorotan karena memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan investasi asing langsung dan semakin banyaknya perusahaan global yang menanamkan modalnya di negara ASEAN (Na & Kang, 2019).

Pada tahun 2023, FDI manufaktur ke Asia Tenggara meningkat sekitar 20 persen (McKinsey & Company, 2024). Selain itu, perusahaan multinasional Tiongkok telah mengumumkan sejumlah mega proyek di berbagai industri strategis ASEAN. Di Vietnam, perusahaan-perusahaan seperti Sunny Optical Technology (pembuat lensa) dan Goertek (spesialis elektronik) telah mendirikan pabrik. Malaysia berhasil menarik investasi signifikan di sektor semikonduktor, baik dari perusahaan-perusahaan Barat maupun Tiongkok seperti Shenzhen HFC. Thailand menarik minat produsen kendaraan listrik (EV) asal Tiongkok—SAIC dan BYD. Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari peningkatan investasi Tiongkok, terutama di sektor logam (aluminium dan nikel) serta rantai pasokan EV (Hunt, 2024).



Berdasarkan data FDI Net Inflows, Singapura mencatat angka tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan total USD 175,2 miliar, diikuti oleh Indonesia sebesar USD 21,5 miliar dan Vietnam sebesar USD 18,5 miliar. Filipina menyusul dengan nilai inflow sebesar USD 9,1 miliar, kemudian Malaysia (USD 7,9 miliar), Thailand (USD 6,5 miliar), dan Kamboja (USD 4,0 miliar). Negara-negara dengan nilai inflow yang lebih kecil adalah Lao PDR (USD 1,7 miliar), Myanmar (USD 1,5 miliar), dan Brunei yang justru mencatatkan FDI negatif sebesar -USD 0,5 miliar. Data ini menunjukkan bahwa Singapura

menjadi tujuan utama investasi asing langsung di kawasan, sementara Brunei mengalami arus keluar investasi.

Banyak faktor yang memengaruhi minat investasi asing langsung di beberapa negara ASEAN, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan utama bagi investor saat menanamkan modal di negara berkembang, terutama di kawasan ASEAN, karena hal-hal ini sangat memengaruhi kelangsungan operasi perusahaan dalam jangka panjang. Faktor tersebut mencakup keuntungan yang diharapkan, ketersediaan tenaga kerja bahan baku, daya beli masyarakat, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan stabilitas dan keberlangsungan kegiatan bisnis.

Untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari investasi, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek di negara tujuan. Keputusan investasi tidak hanya bisa didasarkan pada faktor ekonomi semata, tetapi juga harus mencakup aspek politik yang ada di negara tersebut. Analisis komprehensif terhadap kondisi politik, seperti stabilitas pemerintahan dan tingkat korupsi, sangat penting karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Investor perlu memperhitungkan risiko yang muncul dari kondisi tak terduga, sehingga mereka dapat memproyeksikan pengembalian modal yang sesuai dengan rencana awal.

Keputusan investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tingkat korupsi suatu negara. Korupsi sering dianggap sebagai penghalang utama investasi karena dampaknya yang merugikan bagi negara (Purnama, 2022). Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung kurang menarik bagi investor asing, karena kondisi-kondisi tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian bisnis dan tidak berjalan secara optimal bisnis tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi. IPK mencerminkan bagaimana masyarakat memandang tingkat korupsi di sektor publik dan politik di negara tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Sher Ghalib (2019) dan Muhammad Cahya Purnama (2022) menunjukkan bahwa arus investasi asing langsung ke Asia

Selatan dan ASEAN terkait dengan korupsi yang diukur melalui IPK. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang lebih tinggi sebanding dengan kemungkinan suatu negara menarik investasi asing. Investor melihat situasi ini sebagai bukti bahwa korupsi adalah komponen penting yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan bisnis di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN.

Tabel 1. 1 Data Indeks Persepsi Korupsi di negara ASEAN tahun 2023

Negara	IPK
Singapura	83
Malaysia	50
Vietnam	41
Thailand	35
Indonesia	34
Filipina	34
Kamboja	22
Myanmar	20
Laos	28

Sumber: *Transparency.org*

Berdasarkan data IPK tahun 2023 di negara-negara ASEAN, Singapura menempati posisi tertinggi dengan skor IPK sebesar 83, mencerminkan tingkat persepsi korupsi yang sangat rendah dan tata kelola pemerintahan yang baik. Disusul oleh Malaysia (50) dan Vietnam (41) yang menunjukkan tingkat korupsi sedang. Thailand mencatat IPK sebesar 35, sementara Indonesia dan Filipina sama-sama memperoleh skor 34, yang mengindikasikan masih adanya tantangan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, negara-negara seperti Kamboja (22), Myanmar (20), dan Laos (28) menunjukkan skor yang rendah, menandakan persepsi korupsi yang tinggi. Data ini memberikan gambaran penting terkait kepercayaan publik terhadap sektor publik dan efektivitas institusi pemerintah di masing-masing negara ASEAN.

Perbedaan skor IPK ini tidak hanya mencerminkan tingkat integritas sektor publik di masing-masing negara, tetapi juga berpengaruh terhadap daya tarik investasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Cicchello et al., 2023). Negara-negara dengan skor IPK yang tinggi umumnya dianggap lebih stabil secara hukum dan lebih menarik bagi investor, sementara negara

dengan skor rendah seringkali menghadapi tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan akuntabel (Urinboyev, 2020).

Sebuah studi empiris yang dilaksanakan oleh Anwar (2023) menginvestigasi determinan Foreign Direct Investment (FDI) di lima negara ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, untuk periode 2001–2019. Dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) pada data panel, penelitian tersebut menemukan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap aliran masuk FDI. Sebaliknya, tingkat suku bunga terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya stabilitas makroekonomi dan persepsi korupsi yang rendah sebagai faktor krusial dalam menarik modal asing.

Temuan serupa juga dilaporkan oleh Windy dan Rudi (2021), yang mengonseptualisasikan korupsi—direpresentasikan oleh IPK—sebagai salah satu bentuk risiko politik yang dapat menghambat arus investasi asing. Melalui estimasi dengan metode Generalized Method of Moment (GMM), hasil penelitian mereka mengonfirmasi bahwa IPK memiliki dampak positif dan signifikan terhadap FDI. Lebih lanjut, studi ini juga memperhitungkan faktor lain seperti motif pencarian pasar (*market seeking*) dan efisiensi (*efficiency seeking*) sebagai determinan penting dalam keputusan investasi oleh para investor.

Namun, dalam penelitian Thede & Karpaty (2023) menemukan bahwa efek penghalang korupsi terhadap masuknya FDI dapat dikurangi oleh pengalaman perusahaan multinasional dengan lingkungan yang korup. Perusahaan dengan pengalaman sebelumnya dalam sistem yang korup cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dan mengurangi biaya masuk akibat korupsi, yang mengimplikasikan bahwa korupsi tidak selalu menjadi penghalang signifikan bagi FDI.

Selain korupsi, terdapat faktor lain yang memengaruhi masuknya investasi asing langsung ke sebuah negara. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi

secara maksimal dan tepat guna. Implementasi kebijakan fiskal merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab tersebut, di mana kebijakan ini menjadi alat strategis bagi pemerintah dalam mengendalikan anggaran belanja negara demi terwujudnya kemandirian ekonomi makro.

Sebagai salah satu instrumen fundamental dalam kerangka kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang diarahkan oleh negara untuk membiayai program pembangunan nasional. Pengeluaran ini berfungsi sebagai mekanisme intervensi bagi pemerintah untuk meregulasi serta memengaruhi jalannya perekonomian (Arroyo & Garima Vasishtha, 2025). Jika realisasi dana pembangunan meningkat, pembangunan di Indonesia juga akan meningkat yang berarti infrastruktur ekonomi akan meningkat dan aktivitas ekonomi akan berjalan lebih lancar. Sebuah negara dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mendistribusikan produk mereka, sementara tenaga kerja yang terampil akan memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Selain itu, peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi merupakan komponen pendapatan nasional. Ini adalah sinyal yang kuat bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia (Ameliana & Soebagyo, 2023).

Tabel 1. 2 Pengeluaran Pemerintah di negara ASEAN (Dalam Juta USD)

No	Negara	Pengeluaran Pemerintah	
		2022	2023
1	Vietnam	36.461,41	38.385,83
2	Indonesia	25.389,91	22.040,05
3	Malaysia	47.232,14	47.761,84
4	Filipina	5.939,21	62.154,88
5	Thailand	87.823,36	85.725,46
6	Kamboja	2.359,61	2.573,10
7	Singapura	47.042,54	50.539,9
8	Brunei	3.357,03	3.451,98

Sumber: *World Bank*

Berdasarkan data tersebut, pengeluaran pemerintah di enam negara ASEAN menunjukkan dinamika dan variasi yang signifikan selama periode 2022-2023, yang merefleksikan perbedaan skala ekonomi dan kebijakan fiskal di setiap negara. Hal ini terlihat jelas dari perbandingan antara Thailand, yang

secara konsisten memiliki alokasi belanja tertinggi mencapai 87,82 miliar USD pada 2022, dengan Kamboja yang berada di tingkat terendah. Selain itu, tren perubahan dari tahun ke tahun juga beragam: Vietnam, Malaysia, dan Kamboja menunjukkan peningkatan belanja, sementara Indonesia dan Thailand mengalami sedikit penurunan pada 2023, dan Filipina tercatat mengalami fluktuasi paling dramatis dengan lonjakan pengeluaran yang sangat signifikan. Keragaman dalam besaran dan arah perubahan ini menggarisbawahi peran aktif kebijakan fiskal dan menjadikan pengeluaran pemerintah sebagai variabel ekonomi kunci yang penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks perekonomian regional ASEAN.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pham Nhat Tuan (2021), tujuan utama dari studi tersebut adalah untuk mengevaluasi bagaimana keterbukaan perdagangan dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi arus masuk investasi langsung asing. Penelitian ini menggunakan data tahunan sebanyak 992 observasi dari 32 negara berpendapatan tinggi dan menengah dalam rentang waktu 1990 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik keterbukaan perdagangan maupun pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap FDI. Namun demikian, temuan yang kontras dilaporkan oleh Anwar (2017) dalam studinya yang berfokus pada kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Dengan mengaplikasikan metode *Generalized Least Squares* (GLS), penelitian tersebut mengindikasikan bahwa belanja pemerintah justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Berlandaskan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan pengeluaran pemerintah sebagai determinan dari investasi asing langsung di kawasan ASEAN. Namun, pengaruh tersebut harus diteliti lebih lanjut jika investor asing ingin menanamkan modal langsung di ASEAN karena pengeluaran pemerintah sebagai faktor ekonomi. Selain itu, penelitian tentang dampak indeks persepsi terhadap peningkatan investasi asing langsung juga harus dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menentukan seberapa besar

pengaruh non-ekonomi tersebut terhadap investasi asing langsung di wilayah ASEAN. Selanjutnya, peneliti akan mencoba untuk menentukan apakah faktor ekonomi atau non-ekonomi yang lebih dominan dalam mempengaruhi investasi asing langsung di ASEAN. Untuk melakukan ini, peneliti akan menggunakan investasi asing langsung sebagai variable terikat, dan pengeluaran pemerintah dan indeks persepsi korupsi akan digunakan sebagai variabel bebas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap investasi asing langsung?
- b) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi asing langsung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap investasi asing langsung di ASEAN.
- b) Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi asing langsung di ASEAN.

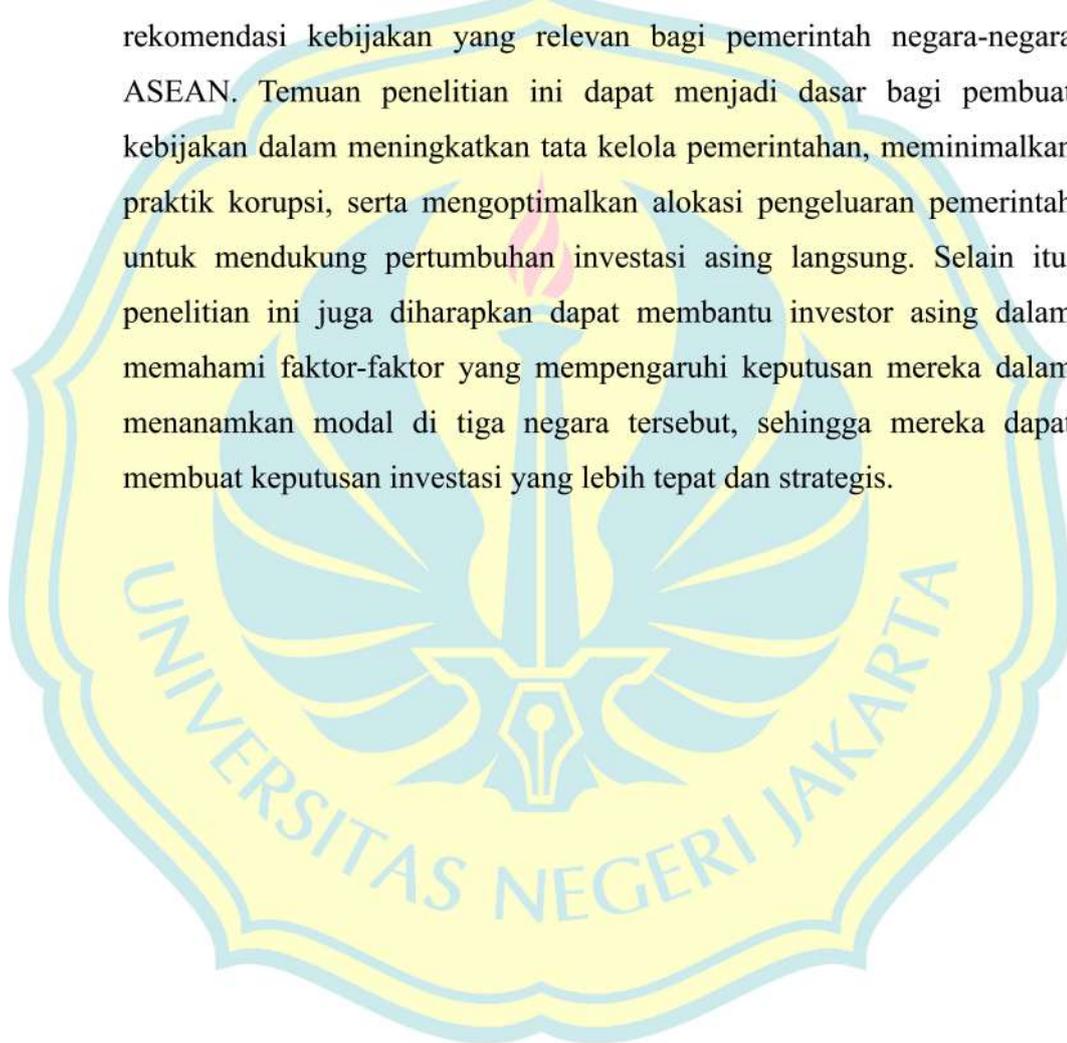
1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis bagi pembaca. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

- a) Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terkait determinan investasi asing langsung di negara-negara berkembang, khususnya di kawasan ASEAN. Banyak penelitian sebelumnya yang telah meneliti faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan nilai tukar dalam memengaruhi investasi asing langsung, namun masih terbatas kajian yang secara komprehensif

menggabungkan faktor politik dan institusional seperti korupsi dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai interaksi antara korupsi, kebijakan pengeluaran pemerintah, dan arus investasi asing langsung.

- b) Dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah negara-negara ASEAN. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, meminimalkan praktik korupsi, serta mengoptimalkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan investasi asing langsung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu investor asing dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menanamkan modal di tiga negara tersebut, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan strategis.



Intelligentia - Dignitas